

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan dasar yang digunakan perusahaan untuk memahami *corporate governance*. Teori ini membahas hubungan antara agen dan pemegang saham (*principal*), dimana agen adalah pihak manajemen dan *principal* adalah pemilik dan pemegang saham (Rini, 2010), menurut Brigham dan Houston (2011), manajer memiliki tujuan yang pribadi yang bersaing dengan tujuan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Manajer diberi kekuasaan oleh pemilik perusahaan, yaitu pemegang saham, untuk membuat keputusan, dan hal ini menciptakan konflik potensial atas kepentingan yang disebut teori agen (*agency theory*). Hubungan agen muncul ketika satu orang individu atau lebih yang disebut pemilik (*principal*) memperkerjakan individu lain organisasi yang disebut agen untuk melaksanakan pekerjaan dan kemudian mendelegasikan otorisasi pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Permasalahan agen yang potensial ini muncul ketika manajer perusahaan memiliki kurang dari 100 persen saham perusahaan. Jika perusahaan dikelola sebagai perusahaan perseorangan oleh pemiliknya, maka manajer atau pemilik akan menjalankan perusahaan untuk memaksimalkan kesejahteraannya. Namun, jika manajer atau pemilik menjual beberapa saham kepada pihak luar, maka konflik kepentingan yang potensial akan segera muncul. Pada kebanyakan perseroan besar, konflik agen yang potensial ini sangat penting, karena manajer perusahaan besar umumnya hanya memiliki saham dalam presentase kecil.

Adanya perbedaan kepentingan dan tujuan tersendiri dalam menjalankan hubungan kontrak dapat memunculkan konflik karena manajer perusahaan (agen) cenderung untuk mengejar tujuan pribadinya, sedangkan *principal* menginginkan hasil kinerja perusahaan meningkat (Pramono, 2011).

Terdapat sejumlah cara untuk menyelaraskan kepentingan pemegang saham (*prinsipal*) dengan manajer (*agent*), salah satunya adalah melakukan penerapan dan pengungkapan terkait isu *corporate governance*. Dengan penerapan *corporate governance*, diharapkan perusahaan (*agent*) dapat dilaksanakan tanggung jawab terhadap suatu pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham sebagai *principal* (Warsono et al., 2009) sehingga konflik kepentingan antara *agent* dan *principal* dapat diminimalkan. Dalam menggalangi masalah tersebut, diharapkan perusahaan dapat mengungkapkan dan mengimplementasikan *corporate governance* dengan baik dan benar demi membuktikan komitmen perusahaan terhadap pemangku kepentingan sehingga dapat mengurangi resiko yang terburuk, yaitu kebangkrutan perusahaan.

2. Corporate governance

Corporate governance adalah suatu konsep tata kelola perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengawasan atau pementauan kinerja manajemen dan menjamin pertanggung jawaban manajemen kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi perusahaan publik telah diatur dalam putusan badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan nomor: KEP-134/BL/2006. Peraturan tersebut mengukur kewajiban penyampaian laporan tahunan serta bentuk dan isinya.

Corporate governance merupakan isu yang tidak pernah usang untuk terus dikaji pelaku bisnis, akademi, pembuat kebijakan, dan lain sebagainya. Pemahaman tentang praktik

Corporate governance waktu kajian terus berevolusi dari waktu ke waktu. Kajian atas *Corporate governance* mulai disinggung pertama kalinya oleh Berle dan Means (1932), ketika membuat sebuah buku yang menganalisis terpisahnya kepemilikan saham (*ownership*) dan *control*.

Timbulnya konflik kepentingan antara pemegang saham dengan pihak manajemen dalam struktur kepemilikan perusahaan tersebar (*dispersed ownership*). Untuk pertama kalinya, usaha untuk melambungkan *Corporate governance* dilakukan oleh *Bank of England and London Stock Exchange* pada tahun 1992 dengan membentuk *Cadbury Committee*, yang bertugas menyusun *Corporate Governance Code* yang menjadi acuan utama (*benchmark*) di banyak Negara. Surya dan Yustiavandana (2006).

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), dalam Rini (2010) melihat *Corporate Governance* sebagai suatu sistem dimana sebuah perusahaan atau entitas bisnis diarahkan dan diawasi. Sejalan dengan itu, maka struktur dari *Corporate Governance* menjelaskan distribusi hak-hak dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terlibat dalam sebuah bisnis, yaitu antar dewan komisaris dan direksi, manajer, pemegang saham, serta pihak-pihak lain yang terkait sebagai *stakeholder*.

Corporate Governance juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja, *corporate governance* yang baik dapat memberikan rangsangan bagi dewan dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya dengan lebih efisien (Surya dan Yustiavandana, 2006).

Untuk menerapkan *good corporate governance* dalam perusahaan, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mengeluarkan asas-asas dalam pedoman umum *good corporate governance* Indonesia tahun 2010 yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Demokrasi

Demokrasi mengandung tiga unsur pokok yaitu partisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat dan perwujudan kepentingan umum. Asas demokrasi harus diterapkan baik dalam proses memilih dan dipilih sebagai penyelenggara negara maupun dalam proses penyelenggara Negara.

b. Transparansi

Transparansi mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Transparansi diperlukan agar pengawasan oleh masyarakat dan dunia usaha terhadap penyelenggaraan negara dapat dilakukan secara obyektif. Untuk itu, diperlukan penyediaan informasi melalui sistem informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah tentang pola perumusan dan isi peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik serta pelaksanaannya oleh masing-masing lembaga negara. Transparansi juga diperlukan dalam rangka penyusunan dan penggunaan anggaran. Asas transparansi ini tidak mengurangi kewajiban lembaga negara serta penyelenggaraan negara untuk merahasiakan kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus menolak memberikan informasi yang berkaitan dengan keselamatan negara, hak-hak pribadi dan rahasia jabatan.

c. Akuntabilitas

Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggung jawabkannya. Akuntabilitas diperlukan agar setiap lembaga negara dan penyelenggara negara melaksanakan tugasnya secara bertanggungjawab. Untuk itu, setiap penyelenggara harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan terukur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berlaku serta menghindarkan penyalahgunaan wewenang.

d. Budaya Hukum

Budaya hukum mengandung unsur penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu dan ketaatan terhadap hukum oleh masyarakat berdasarkan kesadaran. Budaya hukum harus ditegakan agar lembaga negara dan penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya selalu didasarkan keyakinan untuk berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, setiap lembaga negara dan penyelenggara negara berkewajiban untuk membangun sistem dan budaya hukum secara berkelanjutan baik dalam proses penyusunan dan penetapan perundang-undangan serta kebijakan publik maupun dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Penetapan perundang-undangan dan kebijakan publik harus dilakukan atas dasar kepentingan umum dan dilaksanakannya secara konsekuen.

e. Kewajaran dan Keutamaan

Kewajaran dan keutamaan mengandung unsur keadilan dan kejujuran sehingga dalam pelaksanaannya diwujudkan perlakuan setara terhadap pemangku kepentingan secara

bertanggung jawab. Kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk dapat mewujudkan pola kerja lembaga negara dan penyelenggaraan negara yang lebih adil dan bertanggung jawab. Kewajaran dan kesetaraan juga diperlukan agar pemangku kepentingan dan masyarakat menjadi lebih menaati hukum dan hindari terjadinya benturan kepentingan. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya lembaga negara dan penyelenggara negara harus senantiasa memperhatikan kepentingan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

3. Luas Pengungkapan *Corporate Governance* dalam laporan tahunan

Laporan tahunan merupakan alat yang digunakan menginformasikan kepada *stakeholder* dalam pertimbangannya mengambil keputusan. laporan tahunan adalah elemen utama dalam melakukan penelitian terkait pengungkapan *corporate governance*, karena berbagai macam informasi perusahaan dan praktik pengungkapan *good corporate governance* terdapat didalam laporan tahunan. Rini (2010) menyatakan bahwa laporan tahunan juga digunakan sebagai bentuk akuntabilitas manajemen atas kinerjanya sebagai pengelola perusahaan kepada investor sebagai pemilik. *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), menyatakan bahwa kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan bahwa pengungkapan yang tepat waktu dan akurat dibuat pada semua materi penting mengenai korporasi, termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan tata kelola perusahaan.

Pengungkapan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pengungkapan umum dan pengungkapan tertentu. Pengungkapan secara umum, meliputi pengungkapan wajib dan pengungkapan suka rela. Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan yang diharuskan berdasarkan peraturan yang berlaku, sedangkan pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan diluar prasyarat minimal atau pengungkapan yang melebihi dari yang diwajibkan.

Pengungkapan tertentu terdiri dari pengungkapan laporan keuangan (*financial disclosure*), pengungkapan tanggung jawab sosial (*social responsibility disclosure*), *environmental disclosure*, termasuk pengungkapan aspek tata kelola perusahaan (*corporate governance*) (Kusumawati, 2006).

Kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi perusahaan publik telah diatur dalam keputusan badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan nomor: KEP-134/BL/2006. Peraturan tersebut mengatur kewajiban penyampain laporan tahunan serta bentuk dan isinya. Dari sekian banyak informasi yang wajib disampaikan dalam laporan tahunan, disebutkan bahwa laporan tahunan wajib membuat uraian singkat mengenai laporan penerapan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dalam periode laporan keuangan terakhir (Hikmah, Chairina, dan Rahmayanti, 2011).

Dalam penelitian ini, *item* pengungkap yang digunakan berupa *item-item* yang diwajibkan dalam Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP/134/BL/2006 Peraturan X.K.6. Selain *item* yang diwajibkan oleh BAPEPAM, penelitian ini juga menggunakan *item-item* yang diperoleh dari Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Berdasarkan peraturan dan pedoman tersebut, diperoleh sebanyak 16 indikator pengungkapan, *Item* pengungkapan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1

No	Item Point	Item Pengungkapan
----	------------	-------------------

1	Pemegang Saham	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uraian hak pemegang saham 2. Pernyataan mengenai jaminan perlindungan hak atas pemegang saham perlakuan yang setara terhadap semua pemegang saham 3. Tanggal pelaksanaan RUPS 4. Hasil RUPS
2.	Dewan Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama-nama anggota dewan komisaris 2. Status setiap anggota dewan komisaris (komisaris independen atau komisaris bukan independen) 3. Latar belakang pendidikan dan karier dewan komisaris 4. Uraian mengenai tugas dan tanggung jawab dewan komisaris 5. Kebijakan dan jumlah remunerasi anggota dewan komisaris 6. Mekanisme dan criteria penilaian sendiri (<i>self assestment</i>) tentang kinerja masing-masing anggota dewan komisaris 7. Jumlah rapat yang dilakukan 8. Jumlah kehadiran setiap anggota dewan komisaris 9. Mekanisme pengambilan keputusan 10. Program pelatihan dewan komisaris

3.	Dewan Direksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama-nama anggota dewan direksi dengan jabatan dan fungsinya masing-masing 2. Uraian mengenai tugas dan tanggung jawab direksi 3. Latar belakang pendidikan dan karier anggota direksi 4. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota direksi <p>Penjelasan ringkas mengenai mekanisme kerja direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Mekanisme pengambilan keputusan 6. Mekanisme pendelegasian wewenang 7. Kebijakan dan jumlah remunerasi anggota direksi 8. Jumlah rapat yang dilakukan oleh direksi 9. Jumlah kehadiran setiap anggota direksi dalam rapat 10. Mekanisme dan kriteria penilaian terhadap kinerja para anggota direksi 11. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi direksi
4.	Komite Audit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan jabatan anggota komite audit 2. Riwayat hidup singkat setiap anggota komite audit 3. Uraian tugas dan tanggung jawab komite audit 4. Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh dewan audit 5. Jumlah kehadiran setiap anggota dalam rapat 6. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite audit 7. Independensi anggota komite audit

		8. Keberadaan piagam komite audit (<i>audit commite charter</i>)
5.	Komite Nominasi dan Remunerasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan jabatan anggota komite nominasi dan remunerasi 2. Riwayat hidup singkat setiap anggota komite nominasi dan remunerasi 3. Uraian tugas dan tanggung jawab komite nominasi dan remunerasi 4. Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite nominasi dan remunerasi 5. Jumlah kehadiran setiap anggota dalam rapat 6. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan remunerasi 7. Independensi anggota komite nominasi dan remunerasi
6.	Komite Manajemen Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan jabatan anggota komite manajemen risiko 2. Riwayat hidup singkat setiap anggota komite manajemen risiko 3. Uraian tugas dan tanggung jawab komite manajemen risiko 4. Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite manajemen risiko 5. Jumlah kehadiran setiap anggota dalam rapat 6. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite manajemen risiko

		7. Independensi anggota komite manajemen risiko
7.	Komite-komite lain yang dimiliki Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan jabatan anggota komite 2. Riwayat hidup singkat setiap anggota komite 3. Uraian tugas dan tanggung jawab komite 4. Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite 5. Jumlah kehadiran setiap anggota dalam rapat 6. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite 7. Independensi anggota komite
8.	Sekretaris Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama sekretaris perusahaan 2. Riwayat singkat sekretaris perusahaan 3. Uraian mengenai tugas dan tanggung jawab sekretaris perusahaan
9.	Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian internal (<i>internal audit and control</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang keberadaan SPI (Satuan Pengawas Internal) 2. Jumlah anggota SPI 3. Jabatan masing-masing anggota SPI 4. Uraian mengenai tugas dan tanggung jawab SPI 5. Uraian mengenai aktivitas SPI selama setahun 6. Penjelasan mengenai audit internal perusahaan

10.	Manajemen Risiko Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi oleh perusahaan 2. Upaya untuk mengelola risiko-risiko tersebut
11.	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, Anggota Dewan Direksi, dan Anggota Dewan Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pokok perkara atau gugatan 2. Posisi kasus 3. Status penyelesaian perkara atau gugatan 4. Pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan
12.	Akses Informasi dan Data Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misal : melalui website, media massa, <i>mailing list</i>, bulletin, dan sebagainya 2. Daftar penyebaran informasi kepada public
13.	Etika Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan pedoman perilaku (<i>code of conduct</i>) 2. Isi <i>code of conduct</i> 3. Penyebarab <i>code of conduct</i> kepada karyawan dan upaya penegakkannya 4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan
14	Tanggung Jawab Sosial	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Karyawan <ol style="list-style-type: none"> 1. Uraian mengenai pengakuan hak-hak karyawan 2. Uraian mengenai persamaan kesempatan kepada seluruh

		<p>karyawan</p> <ol style="list-style-type: none">3. Uraian mengenai jaminan terciptanya lingkungan kerja yang kondusif4. Komite perusahaan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja5. Manajemen keselamatan kerja <ul style="list-style-type: none">➤ Keberadaan peraturan keselamatan kerja➤ Konsumen <ol style="list-style-type: none">6. Deskripsi mengenai komitmen perusahaan terhadap perlindungan konsumen <ul style="list-style-type: none">➤ Masyarakat <ol style="list-style-type: none">7. Program kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan (program kemitraan dan pembinaan usaha kecil)8. Biaya yang dikeluarkan dalam program kemitraan <p>Program Bina Lingkungan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">9. Bantuan korban bencana alam atau bantuan social lainnya10. Bantuan pendidikan (beasiswa) dan pelatihan11. Perkembangan sarana umum12. Biaya yang dikeluarkan <ul style="list-style-type: none">➤ Dialog dengan masyarakat➤ Lingkungan
--	--	--

		<p>13. Komitmen perusahaan terhadap pelestarian lingkungan</p> <p>14. Program pelestarian lingkungan yang dilakukan perusahaan</p>
15	<p>Pernyataan Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan prinsip-prinsip GCG 2. Keberadaan pedoman pelaksanaan GCG (Manual GCG) dalam perusahaan 3. Kepatuhan terhadap pedoman GCG 4. Keberadaan <i>Bear Manual</i> (panduan bagi komisaris dan direksi dalam melaksanakan tugas) 5. Struktur tata kelola perusahaan 6. Hasil penilaian penerapan GCG dalam setahun 7. Audit GCG (jasa atestasi) oleh eksternal auditor
16	<p>Informasi penting lainnya yang berkaitan dengan penerapan <i>Good corporate governance</i> (GCG)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi perusahaan 2. Misi perusahaan 3. Nilai-nilai perusahaan 4. Kepemilikan saham oleh anggota dewan komisaris dan Direksi beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya 5. Uraian mengenai kepatuhan terhadap peraturan perundangan peraturan pasar modal 6. Uraian mengenai mengenai transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan 7. Uraian mengenai etika bisnis dalam perusahaan

Sumber:

- a. Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan dalam peraturan X.K.6 Nomor: Kep-134/BL/2006
- b. Pedoman umum corporate governance Indonesia (KNKG,2006)

Berdasarkan 16 indikator tersebut memuat *item* pengungkapan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu perusahaan telah mengungkapkan informasi mengenai corporate governance.

e.Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Corporate governace

1. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menggambarkan besar atau kecilnya sebuah perusahaan. Menurut Marwata (2001), perusahaan besar memiliki sumber daya yang besar. Dengan sumberdaya yang besar tersebut, perusahaan mampu membiayai penyediaan informasi untuk keperluan internal. Informasi tersebut sekaligus menjadi bahan untuk keperluan pengungkapan informasi kepada pihak eksternal, sehingga tidak perlu ada tambahan biaya yang besar untuk melakukan pengungkapan dengan sumber daya yang relative kecil mungkin tidak memiliki informasi siap saji sebagaimana perusahaan besar. Sehingga, perusahaan besar memiliki inisiatif untuk menyajikan pengungkapan sukarela, karena perusahaan besar dihadapkan pada biaya dan tekanan politik yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil. Perusahaan kecil cenderung untuk menyembunyikan informasi penting dikarenakan persaingan yang tidak menguntungkan.

Jensen dan Meckling (1976) dalam Hikmah, Chairina, dan Rahmayanti (2011) mengatakan bahwa pengaruh ukuran perusahaan dengan luas pengungkapan dapat dijelaskan melalui teori agensi dimana dinyatakan bahwa perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar daripada perusahaan kecil. Perusahaan besar akan mengungkap informasi yang lebih

banyak dalam mengurangi biaya keagenan, biaya keagenan tersebut di kelompokkan dalam tiga bentuk, yaitu (1) *Monitoring Costs*, merupakan biaya untuk monitoring perilaku manajer, (2) *Bonding Costs*, merupakan biaya untuk membentuk mekanisme untuk menjamin bahwa manajer akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham, dan (3) *Residual Loss*, merupakan biaya untuk mendorong manajer bertindak sesuai dengan kemampuan untuk kepentingan pemegang saham.

2. Umur *Listing* Perusahaan

Menurut Yularto dan Chariri (2003), umur perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan dapat tetap bertahan, maupun bersaing, dan memanfaatkan peluang bisnis dalam suatu perekonomian. Perusahaan yang memiliki umur *listing* lebih lama, akan meningkatkan praktik pengungkapan dari waktu ke waktu. Hal ini dikarenakan perusahaan dianggap telah memiliki lebih banyak pengalaman dalam pengungkapan laporan tahunannya. Perusahaan yang telah memiliki pengalaman lebih banyak akan lebih memahami kebutuhan pengguna informasi yang lebih detail mengenai perusahaan yang berkepentingan terhadap perusahaan.

Perusahaan yang sudah berdiri lebih lama diasumsikan telah memiliki banyak *stakeholders*. Hal ini menyebabkan perusahaan mengungkap informasi yang seluas-luasnya sebagai wujud dari tanggung jawab perusahaan kepada *stakeholders*. Disisi lain, *stakeholders* juga menuntut perusahaan untuk mengungkap informasi secara detail agar dapat digunakan mengetahui kondisi perusahaan sebenarnya.

3. Kepemilikan Dispersi

Dallas (2004) dalam Nurnyaman (2008), menyatakan bahwa kepemilikan saham dikatakan terkonsentrasi jika sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok, sehingga pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang relative dominan

dibandingkan dengan lainnya. Kepemilikan saham dikatakan menyebar, jika kepemilikan saham menyebar secara relative merata ke publik, tidak ada yang memiliki saham dalam jumlah yang sangat besar dibandingkan dengan lainnya.

Capital markets transactions hypothesis (Haely dan Palepu(2000) dalam Hikmah, Chairina, dan Rahmayanti, 2011), menghipotesiskan bahwa ketika manajemen atau pemegang saham pengendali perusahaan berada pada posisi *superior information*, maka akan menimbulkan asimetri informasi antara pegang saham pengendali atau manajemen dengan pemegang saham minoritas. Tingginya asimetri informasi akan meningkatkan biaya modal sehingga akan menurunkan harga saham perusahaan tersebut, oleh karena itu pemegang saham pengendali harus menjaga kepentingan pemegang saham minoritas dengan mendorong manajemen untuk meningkatkan pengungkapan informasi guna mengurangi asimetri informasi(Nuryaman (2009) dalam Hikmah, Chairina, dan Rahmayanti, 2011).

Sutomo (2004) dalam Nuryaman (2009) dalam Hikmah, Chairina, dan Rahmayanti (2011) menyatakan bahwa semakin menyebar kepemilikan saham, akan semakin banyak informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan karena adanya keinginan publik untuk memperoleh informasi yang seluas-luasnya mengenai perusahaan tempat mereka berinvestasi dan untuk mengawasi tindakan manajemen.

Teori agensi juga menyatakan bahwa pengungkapan akan lebih luas pada perusahaan yang struktur kepemilikannya lebih menyebar (Haniffa dan Cooke (2002), Kusumawati (2006) dalam Hikmah, Chairina, dan Rahmayanti, 2011). Hikmah, Chairina, dan Rahmayanti (2011) menyimpulkan bahwa semakin terdispersinya kepemilikan saham maka semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan. Tuntutan publik atas transparansi perusahaan

untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas dalam laporan tahunan juga semakin besar dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki kepemilikan terkonsentrasi.

4. Profitabilitas

Profitabilitas mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham tertentu (Hanafi, 2008). Menurut Martono dan Harjito (2008), profitabilitas atau rasio keuntungan atau rentabilitas, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari keuntungan modalnya. Semakin tinggi angka rasio profitabilitas, maka akan semakin baik kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba sehingga perusahaan akan cenderung untuk mengungkap informasi tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Muhamad *et al.* (2009) dalam Natalia dan Zulaikha (2012) menyatakan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi lebih cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi. Informasi ini digunakan untuk mendukung kelangsungan posisi perusahaan tersebut. Pendapatan atau profitabilitas yang lebih besar memotivasi manajemen untuk menyediakan pengungkapan informasi yang lebih luas untuk memberikan jaminan kepada investor. Selain itu, profitabilitas perusahaan yang meningkat juga bisa berasal dari meningkatnya kapasitas perusahaan atau sumber pendanaan perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis.

Meningkatnya profitabilitas suatu perusahaan dapat disebabkan oleh meningkatnya kapasitas perusahaan atau sumber pendanaan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Meningkatnya kapasitas perusahaan atau sumber pendanaan ditandai dengan meningkatnya jumlah dan ragam pemangku kepentingan yang mempercayakan sebagian hartanya untuk disertakan dalam modal perusahaan. Bertambahnya sumber pendanaan ini akan memacu perusahaan untuk meningkatkan

produktifitas dan mengembangkan aktifitas perusahaan sehingga profitabilitas perusahaan akan cenderung naik. Pada praktiknya, peningkatan jumlah dan ragam pemangku harus disertai dengan pengungkapan informasi, khususnya informasi dengan mengenai *corporate governance* sebagai respon tanggung jawab atas penggunaan dana pemangku kepentingan oleh perusahaan. Dengan laporan informasi mengenai *corporate governance* yang memiliki kualitas yang tinggi, maka pemangku kepentingan akan semakin yakin dengan cara yang ditempuh oleh manajemen. Cara-cara yang dimaksud adalah cara-cara yang memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholder*), tidak hanya berdasarkan kepentingan perusahaan saja. Dengan demikian, kenaikan profitabilitas akan menyebabkan kecenderungan kenaikan tingkat pengungkapan laporan informasi *corporate governance* (Natalia dan Zulikha, 2012).

5. Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab untuk memonitor dan mengandalikan tindakan manajemen, memberi nasehat kepada dewan direksi serta memastikan perusahaan telah menetapkan tata perusahaan dengan baik (Suta, 2012).

Komite Nasional Kebijakan Governance (2009), mendefinisikan dewan komisaris adalah organ perusahaan yang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance*. Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam pengambilan keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota dewan komisaris utama adalah setara, dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris secara kolektif. Tugas komisaris

utama adalah mengkoordinasikan kegiatan dewan komisaris. Agar pelaksanaan tugas dewan komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut :

- 1) Komposisi dewan komisaris harus dapat menjamin berjalannya mekanisme *check and balance* sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cermat, serta independen.
- 2) Anggota dewan komisaris harus profesional yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
- 3) Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara terhadap manajemen yang kinerjanya kurang baik.

Sehingga, semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Kaitannya dengan pengungkapan *corporate governance*, maka dengan adanya tekanan terhadap manajemen, pengungkapan *corporate governance* akan semakin luas.

6. Leverage

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini memfokuskan pada kewajiban perusahaan (Hanafi, 2008). Perusahaan yang memiliki tingkat utang yang tinggi dalam struktur modalnya akan cenderung menjadi subjek untuk dikenai pengawasan oleh kreditur yang lebih ketat yang biasanya dinyatakan dalam kontrak utang yang dibuat. Sehingga perusahaan akan lebih meningkatkan dan mementingkan

kualitas *corporate governance*, karena merasa ada pengawasan diri dari pihak eksternal (Sulyanti, 2011).

Black dkk., 2003 (dalam Darmawati, 2006), menjelaskan hubungan antara struktur modal dengan kualitas *corporate governance* suatu perusahaan, mengatakan bahwa kreditur sangat berkepentingan dengan praktik *governance* dari debiturnya dan memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan pemegang saham untuk memaksa perusahaan meningkatkan kualitas *corporate governance* perusahaan. Jadi, dengan adanya tuntutan dari kreditur terhadap manajemen, pengungkapan *corporate governance* akan semakin luas.

7. Penelitian Terdahulu

Rianto Jati Putranto, Surya Raharjo (2013) melakukan penelitian yang menguji pengaruh ukuran perusahaan, umur listing perusahaan, kepemilikan dispersi, profitabilitas, dan ukuran dewan komisaris terhadap luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan perusahaan perbankan yang terdaftar dibursa efek Indonesia tahun 2009-2011. Variabel ukuran perusahaan ditolak sehingga berpengaruh negatif secara signifikan terhadap *corporate governance*, variabel diterima sehingga berpengaruh positif terhadap *corporate governance*, variabel profitabilitas ditolak sehingga tidak berpengaruh terhadap *corporate governance*, variabel ukuran dewan komisaris di terima sehingga ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap *corporate governance*, variabel kualitas audit ditolak sehingga kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *corporate governance*.

Hikmah, Chairina, dan Rahwayanti (2011) melakukan penelitian yang menguji pengaruh ukuran perusahaan, umur listing perusahaan, kepemilikan dispersi, profitabilitas, dan ukuran dewan komisaris terhadap luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan

perusahaan perbankan yang terdaftar dibursa efek Indonesia pada tahun 2007-2009. Dan jumlah populasi sampai tahun 2009 sebanyak 29 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya ukuran dewan komisaris yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*, sedangkan umur listing perusahaan, kepemilikan disperse, dan profitabilitas tidak berpengaruh yang positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Evana (2007) melakukan penelitian mengenai leverage, konsentrasi kepemilikan asing dan pertumbuhan perusahaan terhadap kualitas implementasi *corporate governance* yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada tahun 2001-2004. Jumlah populasi sampel penelitian yang diteliti hanya 40 perusahaan yang hanya termasuk sepuluh peringkat teratas dari 138 perusahaan yang terdaftar pada tahun 2001-2004. Terdapat tiga variabel independen yang digunakan, yaitu leverage, konsentrasi kepemilikan asing dan pertumbuhan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya *leverage* yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas implementasi *corporate governance* pada perusahaan, sedangkan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas implementasi *corporate governance*.

8. Hipotesis

1. Pengaruh Ukuran perusahaan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*

Almalia (2008) dalam Hikmah, Chairina, dan Rahmawati (2011), menyatakan bahwa terdapat beberapa argumentasi yang mendasar hubungan ukuran perusahaan dengan pengungkapan. Pertama, perusahaan besar yang memiliki sistem informasi pelaporan yang lebih baik cenderung memiliki sumberdaya untuk menghasilkan lebih banyak informasi dan biaya untuk menghasilkan informasi tersebut lebih rendah di bandingkan dengan perusahaan yang

memiliki keterbatasan dalam sistem informasi pelaporannya. kedua, perusahaan besar memiliki instentif untuk menyajikan pengungkapan sukarela, karena perusahaan besar dihadapkan pada biaya dan tekanan politik yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil. Ketiga, perusahaan kecil cenderung untuk menyembunyikan informasi penting dikarenakan persaingan yang tidak menguntungkan.

Ukuran perusahaan dapat diproksikan dengan total asset, penjualan, dan kapasitas pasar. Sudarmadji dan Sularto (2007), menyatakan bahwa semakin besar total asset, penjualan dan kapasitas pasar maka akan semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Ketiga variabel ini digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan karena dapat mewakili seberapa besar perusahaan tersebut.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis pertama penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

2. Pengaruh Umur Listing Perusahaan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*

Semakin lama umur perusahaan maka akan semakin baik perusahaan tersebut, karena perusahaan mempunyai pengalaman yang lebih baik dalam melakukan pengungkapan dari tahun ke tahun, pengalaman yang lebih banyak akan lebih memahami kebutuhan pengguna informasi yang lebih detail mengenai perusahaan yang berkepentingan terhadap perusahaan. Yularto dan Chairina (2003) dalam Hikmah, Chairina, dan Rahmayanti (2011), melakukan penelitian dengan membandingkan luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan yang terdaftar dibursa efek Jakarta sebelum krisis dan pada periode krisis. Salah satu variabel yang digunakan

adalah umur *listing*. Hasil penelitian tahun 1996 menunjukkan bahwa umur listing berpengaruh terhadap luas pengungkapan dengan tingkat signifikan 10%, sedangkan pada tahun 1997 dan 1998 tidak ada pengaruh. Penelitian yang dilakukan oleh Prayogi (2003) dan Kristina (2009), dalam Adhi (2012) menemukan terdapat pengaruh umur listing perusahaan terhadap luas pengungkapan sukarela.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis kedua penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂: Umur listing perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

3. Pengaruh Kepemilikan Dispersi terhadap luas pengungkapan *corporate governance*

Sutomo (2004) dalam Nuryaman (2009) dalam Hikmah, Chairina, dan Rahmayanti (2011) menyatakan bahwa semakin menyebar kepemilikan saham, akan semakin banyak informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan karena adanya keinginan publik untuk memperoleh informasi seluas-luasnya mengenai perusahaan tempat mereka berinvestasi dan untuk mengawasi tindakan manajemen. Tuntutan publik atas transparansi perusahaan untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas dalam laporan tahunan juga semakin besar dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki keterbatasan kepemilikan terkonsentrasi.

Kepemilikan terkonsentrasi, jika sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok, sehingga pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang relative dominan dibandingkan dengan lainnya.

Teori agensi juga menyatakan bahwa pengungkapan akan lebih luas pada perusahaan yang struktur kepemilikannya lebih menyebar (Hanafi dan cooke (2002), Kusumawati (2006) dalam Hikmah, Chairina, Rahmayanti, 2011).

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis ketiga penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃ :kepemilikan dispersi berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

4. Pengaruh profitabilitas terhadap luas pengungkapan *corporate governance*

Shingvi dan Desai (1971), dalam Rahmawati, Mutmainah, Haryanto (2007), dalam Hikmah, Chairina, Rahmayanti (2011) mengidentifikasi *profit margin* dan *earning return* sebagai variabel yang berhubungan secara positif dalam variasi yang di tentukan dalam laus pengungkapan perusahann dengan laba yang lebih tinggi memotivasi manajemen untuk menyajikan informasi yang lebih banyak. Manajer ingin meyakinkan kepada pemilik atau investor tentang profitabilitas yang dicapai perusahaan agar mereka meningkatkan kompensasi pada manajemen melakukan pengungkapan yang lebih luas.

Dalam penelitian ini profitabilitas diukur dengan menggunakan *return on asset* (ROE), yaitu dengan membandingkan antar laba bersih setelah pajak dengan total equitas. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dilihat dari sudut pandang pemegang saham (Hanafi, 2008).

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis keempat penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₄:profitabilitas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

5. Pengaruh Ukuran dewan Komisaris terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Governance*

Tugas komisaris utama adalah mengkoordinasikan kegiatan dewan komisaris. Agar pelaksanaan tugas dewan komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut : Pertama, komposisi dewan komisaris harus dapat menjamin berjalannya mekanisme *check and balance* sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cermat, serta independen. Kedua, anggota dewan komisaris harus profesional yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan. Ketiga, fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara terhadap manajemen yang kinerjanya kurang baik.

Sehingga, semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Kaitannya dengan pengungkapan *corporate governance*, maka dengan adanya tekanan terhadap manajemen, pengungkapan *corporate governance* akan semakin luas.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis kelima penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₅ :ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

6. Pengaruh *Leverage* terhadap Luas Pengungkapan *corporate governance*

Evana, Andriyanto, dan Marbun (2007) berpendapat bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antar leverage dan kualitas implementasi *corporate governance*. Semakin tinggi nilai leverage maka kualitas implementasi *corporate governance* pada perusahaan juga semakin meningkat. Hal ini disebabkan perusahaan yang memiliki leverage yang tinggi membuat kreditur menjadi sangat berkepentingan dengan praktik *corporate governance* dari debiturnya dan memiliki kekuasaan untuk memaksa debitur meningkatkan kualitas implementasi *corporate governance* mereka. Sehingga perusahaan yang bersangkutan akan lebih memperhatikan bahwa berusaha untuk meningkatkan kualitas implementasi *corporate governance* mereka.

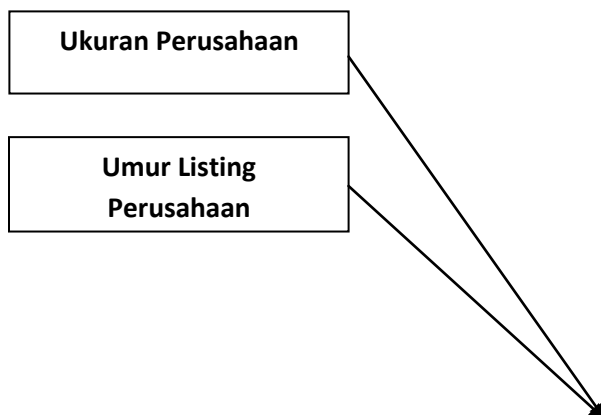
Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis keenam penelitian ini adalah sebagai berikut:

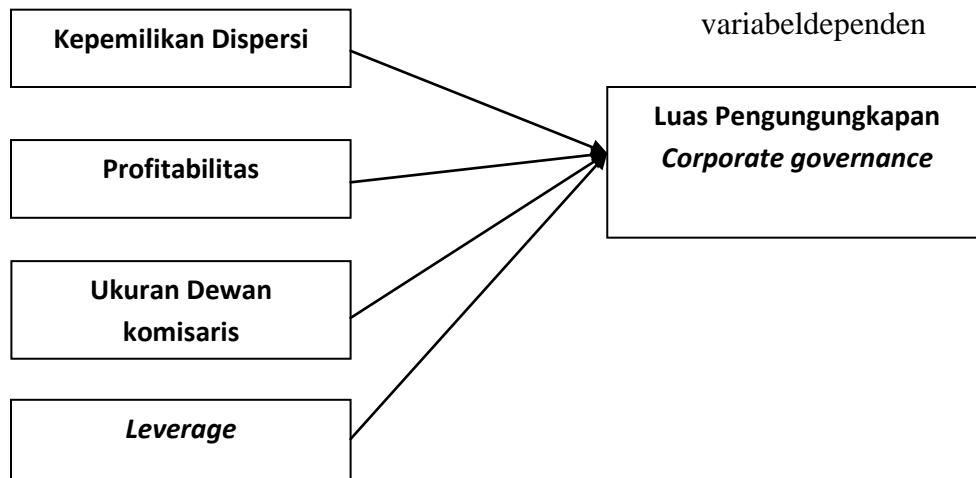
H₆ .leverage berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*

1. Model Penelitian

Model penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan *corporate governance* dapat dilihat pada gambar berikut:

variabelindependen





Gambar

Model Pengaruh Ukuran Perusahaan, umur Listing Perusahaan, Kepemilikan Dispersi, Profitabilitas, Ukuran Dewan Komisaris, dan Laverage Terhadap Luas Pengungkapan Corporate Governance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek